

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Perang Dunia Kedua adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan yakni Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan "perang total", negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan teknologi untuk keperluan perang. Ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk *Holocaust* dan pemakaian senjata bom atom dalam peperangan, perang ini memakan banyak korban jiwa. Perang Dunia II adalah perang paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia(Sommerfield,2008).

Konflik perang mulai di Asia beberapa tahun sebelum pertikaian dimulai di Eropa, yakni setelah Jepang menginvasi Cina tahun 1931 jauh sebelum Perang Dunia II mulai di Eropa tanggal 1 September 1939 - 14 Agustus 1945. Tanggal 1 Maret 1931 Jepang menunjuk Henry Pu Yi menjadi raja di Manchukuo, negara boneka di Manchuria. Pada tahun 1937 perang telah dimulai saat Jepang mengambil paksa Cina. Karena terus-menerus melakukan peperangan, prajurit Jepang mulai kehabisan persediaan makanan. Menyadari situasi ini markas besar militer Jepang membuat strategi baru dengan cara mencari makanan dari musuh. Ini artinya prajurit Jepang harus mulai menjarah rumah-rumah penduduk untuk memperoleh makanan sebagai upaya bertahan hidup. Tindakan militer Jepang ini memicu kemarahan rakyat Cina, dalam keadaan terjepit rakyat Cina mulai melawan dengan memakai cara apa saja. Tindakan orang Cina ini tentu saja menimbulkan masalah baru bagi militer Jepang yang sedang melakukan upaya kolonisasi. Akibatnya militer Jepang mengeluarkan perintah untuk membunuh masyarakat Cina. Pembunuhan keji yang dilakukan tanpa strategi mengakibatkan banyak prajurit Jepang rusak mentalnya dan menjadi gila. Para prajurit Jepang itu bukan hanya melakukan pembunuhan massal, mereka juga mulai melakukan perkosaan secara brutal terhadap perempuan Cina yang terlihat di jalan-jalan. Akibatnya sebagian besar personil militer Jepang mengalami penyakit kelamin akibat melakukan

perkosaan brutal terhadap perempuan-perempuan Cina(Yoshimi,2000). Hal ini mengakibatkan kekuatan militer Jepang di Cina melemah. Situasi ini membuat khawatir para petinggi militer di Tokyo. Sehingga mengirim seorang dokter yang bernama Aso Tetsuo untuk menyelidiki penyebab melemahnya kekuatan militer di Cina. Tak lama setelah penyelidikan berlangsung Aso Tetsuo mengeluarkan rekomendasi untuk markas militer Jepang segera membangun fasilitas prostitusi khusus personel militer yang dikontrol langsung pihak militer untuk meminimalisir pemerkosaan yang mengakibatkan terjadinya penularan penyakit kelamin. Walaupun Jepang sudah membuat peraturan tentang larangan pemerkosaan, tetapi tetap saja peraturan tersebut hanya menguntungkan pihak Jepang. Para wanita penghibur tetap diperlakukan tidak manusiawi dan direkrut secara paksa.

Tidak hanya di China, prajurit Jepang juga melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan di wilayah jajahan Jepang. Rata-rata usia perempuan Asia yang dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang adalah 13 hingga 25 tahun. Selama Perang Dunia II perempuan Cina, Taiwan, Filipina, Singapura, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Korea, dan Belanda dijadikan budak seksual militer Jepang sepanjang tahun 1931-1945. Mereka diharuskan untuk memenuhi kebutuhan biologis seksual tentara militer Jepang dalam jumlah yang besar. Bukan saja mengalami perkosaan secara sistematis, pembunuhan, bahkan sampai terjadi mutilasi. Perempuan-perempuan ini biasa disebut dengan *Comfort Women* atau *Jugun Ianfu*.

Jugun Ianfu adalah istilah Jepang terhadap perempuan penghibur tentara kekaisaran Jepang dimasa perang Asia Pasifik, istilah asing lainnya adalah *Comfort Women*. Pada kenyataannya *Jugun Ianfu* bukan merupakan perempuan penghibur tetapi perbudakan seksual yang brutal, terencana, serta dianggap masyarakat internasional sebagai kejahatan perang. Menurut riset oleh Dr. Hirofumi Hayashi, seorang profesor di Universitas Kanto Gakuin, *Jugun Ianfu* termasuk orang Jepang, Korea, Tiongkok, Malaya (Malaysia dan Singapura), Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, Vietnam, India, Indonesia, Belanda, dan penduduk kepulauan Pasifik. (Hindra, Kimura, 2007)

Menteri Urusan Luar Negeri menolak mengeluarkan visa perjalanan bagi pelacur Jepang, karena khawatir akan mencemari nama Kekaisaran Jepang. Militer kemudian mencari wanita penghibur di luar Jepang, terutama dari Korea dan Cina. Banyak wanita dibohongi dan ditipu untuk bergabung ke rumah bordil militer, sebagian lainnya diculik. Pelacur Jepang yang tetap tinggal di rumah bordil, menyisahkan wanita penghibur non-Jepang menjadi korban pemerkosaan beruntun.

Banyak di antara mereka yang masih berusia di bawah umur ketika direkrut secara paksa. Pada tahap awal perang, penguasa Jepang mengambil pelacur melalui cara konvensional. Iklan yang menawarkan pekerjaan sebagai pelacur muncul di koran-koran yang terbit di Jepang dan koloni Jepang di Korea, Manchukuo, dan daratan Cina. Banyak yang menanggapi iklan ini dahulunya merupakan pelacur dan menawarkan jasa mereka sukarela. Yang lainnya dijual oleh keluarga mereka kepada militer karena kesulitan ekonomi.

Di daerah jajahan Jepang, pemerintahan militer juga mengumpulkan wanita penghibur dari daerah setempat. Di wilayah perkotaan, iklan konvensional melalui orang ketiga (orang lokal) digunakan bersama dengan penculikan, namun di garis depan, terutama di negara dimana orang ketiga jarang tersedia, militer meminta pemimpin lokal untuk menyediakan wanita untuk rumah bordil. Situasi ini menjadi buruk ketika perang berlanjut. Di bawah tekanan usaha perang, militer menjadi tidak mampu lagi untuk menyediakan persediaan yang cukup bagi tentara Jepang; sebagai tanggapan, tentara Jepang meminta atau merampok persediaan dari daerah setempat. Terlebih lagi, ketika orang setempat, terutama Cina, dianggap berbahaya, tentara Jepang mengadakan kebijakan pembersihan, yang termasuk penculikan dan pemerkosaan penduduk setempat.

Perang Dunia II berlangsung pada tahun 1941—1945. Setelah Jerman, Jepang menduduki tempat kedua dalam kekuatan militer. Pada Desember 1941 Jepang menyerang Honolulu, Hawaii, dari udara. Pada saat itu juga Amerika dan Inggris segera menyatakan perang terhadap Jepang. Kemudian Gubernur Hindia Belanda pun turut menyatakan perang terhadap Jepang dan dengan demikian terjadilah perang Pasifik.

Pada tahun 1941 Kekaisaran Jepang telah memantau Filipina sebagai lokasi strategis yang sempurna untuk kampanye mereka untuk menaklukkan Asia tenggara. Bukan hanya lokasi yang sempurna untuk menaruh prajurit dan penyerangan lebih lanjut, tapi Filipina juga merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut berguna untuk mensuplai mesin perang Jepang dan memberi makan orang-orang Jepang di rumah dan di medan perang. Meskipun ada Angkatan Amerika ditempatkan di seluruh Filipina pada saat itu, keputusan Jepang untuk menginvasi Filipina adalah untuk sumber daya alam dan lokasi yang strategisnya.

Pendudukan Jepang di Filipina terjadi antara tahun 1942-1945. Jepang menginvasi Filipina pada tanggal 8 Desember 1941 setelah penyerangan Pearl Harbor. Karena pasukan udara di Pearl Harbor dalam keadaan rusak berat, pangkalan Amerika di Filipina jadi tidak terlindungi, yang

membuat pasukan “*American Asiatic Fleet*” di Filipina melarikan diri ke Jawa pada 12 Desember 1941.

Jepang di masa pendudukannya di Filipina lama kelamaan bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam Filipina, melainkan juga sumber daya manusianya. Pihak militer Jepang mulai melakukan pengerahan tenaga kerja manusia untuk keperluan perang mereka. Semua rakyat dikerahkan, mulai dari pemaksaan untuk menjadi tentara sukarela sampai dengan pekerja paksa, bahkan perempuan pun tidak luput dari pengerahan tersebut.

Perempuan di masa itu juga dikerahkan dalam pekerjaan-pekerjaan massal yang bersifat kerja bakti, seperti penyediaan dapur umum dan juga keterlibatan di dalam palang merah. Perempuan-perempuan ini juga bekerja untuk merawat tentara Jepang yang terluka ketika berperang dengan Sekutu. Pekerjaan yang paling menonjol dalam masa pendudukan Jepang adalah pengerahan tenaga kerja perempuan di bidang seksualitas, yaitu menjadi *jugun ianfu*. Semua pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan Filipina karena posisi mereka yang lemah.

Sebelum tahun 2000 mantan *jugun ianfu* di Filipina dianggap tidak ada karena tidak ada bukti keberadaan dan sumber yang kuat, info ini didapatkan dari pemerintah Filipina ketika para mantan *jugun ianfu* Filipina meminta bantuan kepada pemerintah. Ketika pemerintah Filipina tidak bisa diharapkan, organisasi masyarakat dibentuk untuk mencari korban wanita pengibur yang disebut *The Task Force on Filipino Comfort Women*. Satuan tugas ini berfungsi untuk mencari dan membantu menyelesaikan masalah *jugun ianfu*.

Penyelidikan awal di Hollo dilakukan oleh Gabriela-Iloilo dalam koordinasi dengan *BAYAN women's desk*. Penyelidikan tersebut menemukan seorang *kempeitai* pada waktu kependudukan Jepang di Filipina yang telah mengganti namanya menjadi nama Filipina. Dia mengkonfirmasi bahwa *comfort house* di Iloilo yang dekat Paris Hotel pada jalan dela Rama itu ada. Mantan G-2 (intelijen) juga menegaskan keberadaan *comfort house* di jalan dela Rama. Dua laki-laki tersebut berbicara tentang *jugun ianfu* yang mereka tahu tapi mereka tidak yakin apakah mereka masih hidup. Kesaksian dari wanita-wanita tua juga dikumpulkan di komunitas Rizal, ignore proper dan ignore New Site. Mereka berbicara tentang truk yang mengangkut perempuan yang dibawa ke Paris Hotel (khusus untuk tentara Jepang) dan beberapa hari berikutnya, sejumlah perempuan ditemukan tewas. Di antara perempuan yang disebut sebagai *jugun ianfu* juga ada yang berasal dari Taiwan dan Korea.

Laporan dari Jepang juga dikumpulkan oleh *Lyn Resurreccion* dari *Philippine News and Features* dan juga anggota UNHRC-Filipina dan TF- Filipina *Comfort Women*. Studi pemerintah Jepang menunjukkan bahwa *jugun ianfu* Filipina bekerja di tempat-tempat berikut : Ormoc, Iloilo, Masbate, Cebu, Sta.Cruz (Laguna) Cagayan (Mindanao). Tiga tempat lainnya juga ditunjukkan oleh sebuah Koran Jepang dimana *comfort station* didirikan yaitu : Manila, Tacloban dan Iloilo.

Setelah perang dunia ke dua selesai. Jepang melarikan diri lebih dari setengah abad dari segala tanggung jawabnya terhadap para *Jugun Ianfu* yang mencapai ratusan jiwa. Pemerintah Jepang mulai melakukan tanggung jawab kepada mantan *jugun ianfu* ketika para mantan *jugun ianfu* mulai bermunculan dan menceritakan kisah mereka dengan cara membuat kebijakan untuk membayar kompensasi dari AWF. Upaya para mantan *jugun ianfu* tidak dilakukan sendiri, tetapi mereka bergabung membuat kelompok dari mantan *jugun ianfu*. Tidak hanya mantan *jugun ianfu* saja, para tokoh tokoh dan pemerintah pun ikut serta dalam membantu masalah ini. Pada awalnya mereka menolak kebijakan dari pemerintah Jepang karena tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Namun, ketika terdapat mantan *jugun ianfu* yang ingin menerima tanggung jawab tersebut, para mantan *jugun ianfu* lainnya pun mengikuti. Bagi yang menerima kebijakan ini, mereka mengatakan uangnya mereka gunakan untuk membalas budi. Bagi yang tidak menerima, mereka membuat kelompok baru dan sampai sekarang masih menuntut akan keadilan. Dengan ini penulis hendak mencari tahu bagaimana upaya mantan *jugun ianfu* di Filipina dan pemerintahan Jepang dalam mengatasi masalah *Jugun Ianfu* di Filipina.

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang terjadi pada *Jugun Ianfu* di Filipina.

1. Banyaknya mantan *jugun ianfu* masih merasakan trauma psikologis dan gangguan fungsi fisik akibat pengalaman pahit yang pernah mereka alami.
2. Selama Asia Pasifik (1931-1945), tempat perekrutan *jugun ianfu* berkembang di wilayah pendudukan Jepang di Asia
3. Militer Jepang ikut terlibat langsung dalam pengadaan, pengelolaan dan perekrutan *jugun ianfu* di wilayah-wilayah pendudukan Jepang selama Perang Asia Pasifik

4. Perekrutan yang dilakukan oleh militer Jepang berupa paksaan, bujukan, penipuan dan propaganda.
5. Perempuan dibawah umur yang menjadi *jugun ianfu* dengan paksaan dan tipuan.
6. Jepang melarikan diri dari tanggung jawabnya terhadap *jugun ianfu* selama setengah abad.
7. Pemerintah Filipina tidak membantu banyak atas kasus *jugun ianfu*.
8. Para mantan *jugun ianfu* menuntut tanggung jawab dari pemerintah Jepang.
9. Pemerintah Jepang melakukan program kompensasi terhadap para mantan *jugun ianfu*.
10. Terdapat mantan *jugun ianfu* Filipina yang menerima dan menolak kebijakan Jepang.

1.3.Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, penulis membatasi masalah penelitian pada *jugun ianfu* dan kebijakan pemerintah Jepang kepada para mantan *Jugun Ianfu* khususnya di Filipina.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah yaitu apakah benar adanya tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap mantan *jugun ianfu* di Filipina. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sejarah terbentuknya *jugun ianfu* di wilayah pendudukan Jepang selama perang Asia Pasifik (1931-1945)
2. Bagaimana tuntutan mantan *jugun ianfu* di Filipina terhadap pemerintah Jepang.
3. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap para mantan *jugun ianfu* Filipina.
4. Bagaimana respon dan kondisi para mantan *jugun ianfu* di Filipina sesudah kebijakan pemerintah Jepang dilaksanakan.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Sejarah terbentuknya *jugun ianfu* di wilayah pendudukan Jepang selama perang Asia Pasifik (1931-1945)
2. Tuntutan mantan *jugun ianfu* di Filipina terhadap pemerintah Jepang.
3. Wujud tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap para mantan *jugun ianfu* Filipina.
4. Respon dan kondisi para mantan *jugun ianfu* di Filipina sesudah kebijakan pemerintah Jepang dilaksanakan.

1.6. Manfaat Penelitian

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk lebih memahami kompensasi dari pemerintah Jepang kepada para mantan *jugun ianfu* di Filipina dan memahami kondisi mereka setelah pertanggung jawaban pemerintah Jepang.

Bukan hanya penulis, para pembaca juga bisa memahami sejarah hubungan Jepang dan Filipina pada awalnya melalui penjajahan yang membuat rakyat Filipina sengsara. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi yang berminat untuk memperoleh pengetahuan mengenai Tuntutan Mantan *Jugun Ianfu* Filipina dan Tanggung Jawab Pemerintah Jepang.

1.7. Landasan Teori

Jugun ianfu terdiri dari lima buah kanji yang masing-masing memiliki arti 從 “pembantu” atau “pengikut”, 軍 “tentara”, 慰 “penghibur”, 安 “tenang” atau “senang”, dan 婦 “perempuan”. Dengan demikian, *jugun ianfu* secara literatur dapat diartikan sebagai perempuan penghibur yang mengikuti tentara (Jepang), untuk memberikan kesenangan. (Listiyanti, 2008)

Jugun Ianfu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perempuan penghibur atau dalam istilah bahasa Inggris adalah *comfort women*. Perempuan-perempuan ini terlibat dalam perbudakan seks selama Perang Dunia II di koloni Jepang. Kecenderungan *jugun ianfu* adalah mereka merupakan wanita yang berasal dari wilayah jajahan yang berhasil dikuasai oleh Jepang

atau *Jugun ianfu* merupakan perempuan yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Filipina dan juga di Negara-negara jajahan Jepang lainnya pada masa Perang Dunia II. (Sajor,2000)

Terminologi *Comfort Women* merupakan terjemahan dari *ianfu* (Jugun Ianfu), sebuah istilah yang digunakan oleh pemerintahan Jepang selama Perang Dunia ke II. Terminologi ini dipakai untuk menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kenyamanan (*comfort*) atau menjadi perempuan penghibur bagi tentara Jepang di lokalisasi tertentu yang dikenal sebagai *comfort station*. Lokalisasi ini merupakan sebuah markas perkosaan yang dibangun oleh pemerintah Jepang selama Perang Dunia II. Perempuan-perempuan yang dibangun oleh pemerintah Jepang selama Perang Dunia II. Perempuan-perempuan yang menjadi *Comfort Women* adalah korban kekerasan seksual dan perkosaan selama peperangan. (Chew,Parker,1994)

Jugun ianfu atau wanita penghibur adalah sebuah konsep yang menunjuk kepada mereka yang dinyatakan sebagai korban nafsu birahi tentara Jepang selama masa pendudukan Jepang di daerah-daerah jajahannya. Dengan demikian, keberadaan *jugun ianfu* tidak hanya berlangsung dan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di daerah-daerah di mana tentara Jepang datang dan berkuasa. (Hartanto, Juliantoro, 1997)

Selain *jugun ianfu*, tampaknya Jepang sebelumnya telah mengenal istilah *karayuki-san* dan *geisha* yang juga merupakan perempuan penghibur. Dari asal-usul katanya, *jugun ianfu* memiliki makna sebagai wanita penghibur yang mengikuti para tentara. Mereka diharuskan menghibur para tentara maupun warga sipil yang berwarganegara Jepang. Kecenderungan *jugun ianfu* adalah mereka adalah wanita yang berasal dari wilayah jajahan yang berhasil dikuasai Jepang. Walaupun ada beberapa yang merupakan lanjutan dari para *karayuki-san*. Namun, perbedaan mendasar dari *jugun ianfu* adalah mereka berasal dari wilayah jajahan dan menempati kedudukan yang rendah. Mereka diharuskan melayani para tentara baik dari kalangan menengah ke bawah sampai kepada tentara dari golongan menengah ke atas. Mereka tidak memiliki hak untuk memilih pria mana yang ingin mereka layani(seks). Hal inilah yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai *jugun ianfu*.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,dan cara bertindak. (KBBI,2008:199)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah,2005). Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya (Notoatmojo,2010). Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya (Triwulan,2010).

Tentara yang berada langsung di bawah kekaisaran Jepang ini memiliki nama resmi Imperial Japanese Army (IJA) atau dalam bahasa Jepang disebut Dai Nippon Teikoku Rikugun. Dibentuk atas perintah langsung Kaisar Meiji pada tahun 1868 dan dibubarkan pada tahun 1945 karena kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Militer Jepang ini dikontrol oleh Menteri Peperangan dan Staf Umum Tentara Kekaisaran Jepang (Kodansha, 1983:278). Dalam kasus perekrutan *jugun ianfu*, kedua petinggi militer ini yang memberikan perintah langsung untuk mewajibkan pengadaan sistem hiburan di garis depan peperangan demi mencapai kemenangan.

1.8. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi Tuntutan Mantan *Jugun Ianfu* Filipina dan Tanggung Jawab Pemerintah Jepang ini, jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode pustaka. Pengumpulan data diperoleh dari data-data literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu penulis mencari dan menelaah sumber-sumber tertulis yang ada berupa buku, artikel, skripsi, dan sumber-sumber lainnya yang relevan, serta pencarian artikel melalui internet juga dilakukan sebagai bahan referensi yang mendukung asumsi penulis. Kemudian data-data tersebut dideskripsikan sampai mengacu pada kesimpulan.

1.9. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yaitu :

BAB I : Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas mengenai *jugun ianfu* pada masa pendudukan Jepang di Asia

BAB III : Membahas tentang tema penelitian yaitu tuntutan mantan *jugun ianfu* Filipina dan Tanggung Jawab Pemerintah Jepang

BAB IV : Kesimpulan

